

# LINGKUNGAN PENDIDIKAN MEMPENGARUHI PEREMPUAN DALAM BERDEMOKRASI

**Ridwan Tohopi**

## *Abstrack*

*Democratic country has the advantage in every decision-making in the process of Politics. Similarly, Indonesia, influenced by the role of the education Institution. The government's role in improving the democratic system is the educational environment. Educational environment influence the democratic process. The democratic process is influenced by the role of women's participation for their interests in the world of politics. Women have a very strong role in the process of determining the executive and the legislative and even judicial both central and local government. Therefore, it should be political education should be known by women in democracy. The importance of education for women to get involved in democracy because (1) The current gender that every woman has the status, rights and obligations as opposite sex. (2) Women have special needs that can only be best understood by fellow women themselves. (3) The participation of women as political decision-makers to prevent discrimination against women that has been happening in the community. (4) Only in significant numbers, women can produce changes in regulatory policies and laws that follow insert, the special needs of women as part of the national agenda.*

**Keywords :** *Environmental Education, Women, Democracy*

## **PENDAHULUAN**

Melihat prosentase perempuan yang bersaing dalam pemilu legislatif lalu, 35,35% dari 11,301 total kandidat, orang bisa saja menyimpulkan bahwa hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di Indonesia telah benar-benar dijamin.

Untuk soal hak memilih dan dipilih. Perempuan Indonesia masih harus berjuang untuk bisa mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan sesama perempuan.<sup>1</sup>

Berbagai organisasi perempuan terus berusaha untuk mengangkat derajat keterwakilan perempuan, baik dalam kegiatan organisasi maupun pemuatan intelektual. Sebab melalui pemahaman intelektual yang tinggi, perempuan akan mendapatkan Pendidikan politik yang baik sehingga dapat menciptakan masyarakat perempuan yang cerdas dalam berdemokrasi.

Sejumlah organisasi perempuan tengah berusaha untuk merubah realitas ini dengan menyelenggarakan program pendidikan pemilih yang mengulas tak hanya faktor politik dan budaya, tetapi juga faktor agama yang mempengaruhi peran politik perempuan. Sejak tahun 1999, organisasi-organisasi ini telah melatih kaum perempuan untuk menggunakan hak politik mereka untuk berdemokrasi agar bisa meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam politik. Banyak perempuan Indonesia yang tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negeri ini.

Selain itu, perempuan tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih untuk bungkam dalam berdemokrasi atau tak mau tahu dengan perpolitikan. Akibatnya, perempuan tak bisa terlibat dalam pembuatan legislasi yang mempengaruhi hak-hak mereka dan tak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan.

Tapi kurangnya pengetahuan politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan dalam perpolitikan di negeri ini adalah juga dukungan nilai-nilai budaya

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia. Kantor Berita Common Ground. [www.commongroundnews.org /http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25513&lan=ba&sp=1](http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25513&lan=ba&sp=1). Selasa, 26 Mei 2015

dan agama dipandang turut berperan di dalamnya. Agama, termasuk Islam, telah digunakan sedemikian rupa untuk melanggengkan pemisahan ruang publik untuk laki-laki dan ruang privat untuk perempuan.

Politik hampir selalu disebut-sebut sebagai domain laki-laki hingga perempuan dianggap tak pantas untuk berpartisipasi di dalamnya. Karena itu, program pendidikan pemilih bagi perempuan, terutama yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi perempuan Muslim, tidak boleh hanya menekankan ide tentang hak politik perempuan sebagai hak-hak asasi dan bahwa pengalaman perempuan itu perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik, tetapi juga menekankan bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini menjamin hak-hak politik perempuan sepenuhnya. Dalam Surat al-Mumtahanah, Alquran memerintahkan Nabi untuk menerima baiat perempuan yang ikut dalam pertemuan Aqabah yang terlaksana sebelum beliau hijrah ke Madinah. Perintah ini memperlihatkan bahwa Islam menghargai pentingnya suara perempuan. Keputusan Nabi Muhammad untuk memberikan izin kepada sepupunya, Ummu Hani, untuk memberikan perlindungan kepada seorang serdadu Mekah pada peristiwa Futhu Mekah memperlihatkan bahwa suara perempuan dan tindakannya dihargai.

Qur'an juga mendorong perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka melalui syura, mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik dalam Islam. Ini menunjukkan Islam melihat perempuan sebagai pihak yang berhak membentuk kebijakan publik. Qur'an bahkan menyatakan bahwa Muslim dan Muslimah adalah partner dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemunkaran (QS 9:71).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), h.114

Berkat intisari pedoman Islam diatas, sejumlah perempuan yang pada awalnya enggan berpartisipasi dalam politik mulai berani bergabung dengan partai politik, bahkan menjadi kandidat dalam pemilu legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Sebagian perempuan bahkan ikut memperebutkan kursi ketua partai politik di tingkat daerah. Dengan panduan nilai-nilai Islam, para perempuan kandidat ini menunjukkan komitmen mereka untuk merubah masyarakat dengan cara yang positif, melalui lingkungan demokrasi yang terdidik dengan pola-pola Islami.

Tak hanya itu, peran pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berdemokrasipun di tingkatkan dengan memberikan peluang dan dorongan kepada feminis dalam organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, memonitor kebijakan dan peraturan yang dianggap melanggar dan merugikan hak perempuan serta mengajukan peraturan yang bisa meningkatkan kesetaraan perempuan dalam berbagai sektor. Berdasarkan hal inilah yang dapat menjadi factor penting dalam lingkungan pendidikan untuk menuju arah yang tepat dan bisa mendorong dan memberdayakan setiap perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam berpolitik.

## **PEMBAHASAN**

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya perempuan tidak dapat dipisahkan dengan pemilu yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana perempuan menjadi factor penyeimbang dalam konstalasi perpolitikkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih dari perempuan sangat banyak. Disamping itu perempuan dapat berperan dalam memberikan masukan yang berhubungan dengan program kajian gender. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses

perkembangan sebuah kebijakan yang mengatur kehidupan perempuan dalam masyarakat. Kedudukan perempuan dalam masyarakat sebelumnya tidak di perhitungkan dalam dunia politik, namun Pasal 55 menyatakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. dengan adanya kebijakan 65 Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu dan Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tersebut perempuan dapat dijadikan partner pria dalam berdemokrasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya lingkungan bidang pendidikan dapat mempengaruhi kualitas perempuan dalam berdemokrasi.

Untuk dapat memahami bagaimana pengaruh lingkungan pendidikan terhadap perempuan dalam berdemokrasi maka kita dapat pahami beberapa faktor pemaknaan sebagai berikut:

### **1. Faktor Lingkungan Pendidikan.**

Adapun Faktor Lingkungan Pendidikan Perempuan Sekitar sebagai Ranah Pembelajaran. Terhadap individu, alam sekitar sangat penting kedudukannya dalam ranah proses pembelajaran sebab di dalamnya memuat beberapa cabang ilmu pendidikan, walaupun Faktor alam sekitar (milieu), merupakan faktor tersendiri dan berdiri sendiri. Faktor milieu tidak dapat disatukan dengan faktor pendidik, karena milieu mempunyai sifat-sifat dan fungsi yang berlainan dengan faktor pendidik. Walaupun keduanya berlainan, namun keduanya juga ada kesamaannya, yaitu keduanya mempunyai pengaruh kepada individu, demikian halnya perempuan. Pengaruh dari milieu atau lingkungan hanya merupakan pengaruh belaka, tidak tersimpul unsur tanggung jawab di dalamnya. Artinya, individu akan untung apabila kebetulan mendapatkan pengaruh yang baik, sebaliknya individu akan rugi apabila kebetulan mendapatkan pengaruh yang kurang baik. Hasilnya pengaruh dari pendidikan merupakan pengaruh yang mengandung unsur tanggungjawab dari pendidik. Demikian halnya lingkungan demokrasi jika sumber

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu dari suatu lingkungan pendidikan yang baik dan benar maka hasilnya juga akan lebih baik, sebab perlakuan proses pendidikan dalam berdemokrasi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait pemilu bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perempuan juga jangan dianggap hanya sebagai unsur pelengkap dalam system kuota dalam perpolitikan sehingga dalam kancah berdemokrasi fungsi perempuan hanya sebagai porsi *affirmative action* 30 persen<sup>3</sup>, harusnya hak perempuan bias setara dengan kaum pria yaitu *fifty-fifty* persen.

Dalam dunia politik, Pendidikan politik dapat dilakukan oleh partai politik sebagai salah satu sarana kaderisasi politik perempuan. Pendidikan politik ini ditujukan bagi kader-kader dari partai tersebut dan konstituen perempuan yang mereka wakili.

## 2. Pentingnya Perempuan Dalam Demokrasi

Dalam konteks demokratisasi dan perpolitikan di Indonesia, isu-isu gender selalu menjadi bahasan wajib para demokrat dan politisi. Isu gender merupakan blue print pemerintah dalam mensahkan UU Pemilu. Konteks negara Indonesia dalam Pemilu dibagi pada beberapa agenda, yaitu pertama adalah pemilihan

---

<sup>3</sup> Soejipto, Ani Widyani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. ( Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005). h. 40

legislatif yang memilih wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan negara, serta ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pelaksana pemerintahan di Provinsi dan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai pelaksana pemerintahan di Kabupaten/Kota.

UU Pemilu Tahun 2003<sup>4</sup> yang mensyaratkan kuota 30 persen bagi perempuan, adalah upaya memberikan ruang gerak aspiratif bagi perempuan. Hal ini menunjukkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang setara pada isu gender. Karena perjuangan kesetaraan gender adalah satu di antara upaya mewujudkan demokratisasi.

Dengan kesetaraan gender, seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan demokratisasi itu sendiri. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sebelum terwujud kesetaraan gender, diperlukan affirmative action bagi perempuan. Keleluasaan dan kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk aktif dan berkarya di dunia sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam rangka pembangunan nasional yang berorientasi pemberdayaan SDM, khususnya kaum perempuan.

Perjalanan sejarah Pemilu dari 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan perjuangan para aktivis perempuan, sejak proses RUU sampai UU Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30 persen. Tetapi patut disyukuri karena memang tidak mudah mengubah paradigma berpikir secara patriarkis menjadi kesetaraan gender.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 23.

Perjuangan pengarusutamaan gender memang membutuhkan waktu. Karena mengubah kebiasaan atau sistem yang telah berlaku sangat lama, bahkan mengakar dan tumbuh subur, dikondisikan dengan sistemik yang oleh pemerintah menjadi cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Walaupun UU Pemilu tahun 2003 telah jelas menyatakan kuota 30 persen untuk kaum perempuan, namun internalisasi dari keputusan ini belum maksimal. Ada beberapa sebab yang menjadikan kaum perempuan termarjinalkan dalam setiap aspek pembangunan di Indonesia.

Pertama, sistem dan struktur pemerintahan yang selalu mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin karena ruang geraknya lebih bebas, sehingga secakap apapun seorang perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena keterbatasan mobilitasnya. Kedua, konstruk budaya yang dilazimkan pada masyarakat Indonesia yang selalu mendiskreditkan peran perempuan dalam keluarga, yaitu hanya sebagai pelengkap atau temen belakang. Ketiga, spirit will atau kemauan berkehendak seorang perempuan yang tidak agresif, sehingga setelah diberi kesempatan untuk berkarya dan berbuat untuk kemajuan dirinya, namun kebanyakan perempuan mengabaikan kesempatan yang tidak datang dua kali. Ketiga penyebab terpinggirkannya peran perempuan pada pembangunan bangsa, yang meliputi masalah sosial politik, budaya, dan ekonomi dapat diminimalisir. Bukti nyata adalah penting hadirnya srikandi-srikandi Indonesia dalam pentas demokrasi nasional dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan intelektual yang seimbang dan setara, antara perempuan dan laki-laki. Sehingga perempuan juga mampu mewarnai demokratisasi di Indonesia. Perempuan dapat menjadi politisi andal dan humanis, namun tidak melupakan perannya sebagai ibu bagi anaknya dan istri pada suaminya.

### **3. Tantangan Perempuan dalam Berdemokrasi**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka menghapuskan kesenjangan gender dalam pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga penghargaan terhadap masyarakat perempuan berfaedah nilai lebih yang sebanding dengan eksistensinya dalam lingkungan politik
- b. Peningkatan service excellent (pelayanan Prima) kepada masyarakat secara luwes berkomunikasi dengan masyarakat luas.
- c. Peningkatan nilai budaya pengakuan atas hak perempuan dalam politik untuk dapat diakui dan tercofer dalam system demokrasi, pengakuan adanya keadilan.<sup>5</sup>
- d. Nilai Savety, Dapat menentralisir konflik yang terjadi dalam dunia politik.

Perempuan dalam tantangan politik sangat besar pengaruhnya karena perempuan dapat menciptakan konflik dan juga dapat meredam konflik yang terjadi jika disandingkan dengan lawan jenisnya, untuk itulah perempuan dalam berdemokrasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam kontrol sosial dimasyarakat dan sekitar lingkungan dimana perempuan itu berada.

### **4. Eksistensi Perempuan dalam Demokrasi**

Peran serta politik perempuan dapat dilihat dari sudut pandang transformasi perempuan yang mencakup fungsionalisme dalam feminisme.<sup>6</sup> Selain itu dapat dilihat juga dari sudut pandang gender specifity yaitu mencakup pola-pola perilaku, ekspresi

---

<sup>5</sup> Budi Shanti. *Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik*, dalam *Jurnal Perempuan* No. 19, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001), h. 21.

<sup>6</sup> Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 12

emosional yang secara sosial dapat dipelajari serta digunakan untuk menilai tingkat kepribadian dan keperempuannya dan seseorang.<sup>7</sup> Sedangkan Barker<sup>8</sup> menyatakan, bahwa aktivitas ini mengarah pada suatu gerakan untuk mengkonstruksi strategi politik yang digunakan untuk melakukan intervensi kedalam kehidupan demi mengabdikan kepada kepentingan perempuan. Pola-pola perilaku maupun ekspresi emosional perempuan dapat terungkap melalui tersedia jejak, baik yang bersifat materiil dan non materiil. Sumber peristiwa yang bersifat materiil diantaranya ; prasasti, laporan tertulis, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat non materiil diantaranya ; lembaga sosial, etik, tradisi, dan sebagainya. Dengan pengecekan secara kritis sumber sejarah tersebut di atas akan membuka wawasan di dalam melihat peranan perempuan. Hal senada disampaikan Sendratari<sup>9</sup>, bahwa gambaran perempuan dapat digali lewat dokumen dan kesaksian pelaku peristiwa.

Peran perempuan untuk ikut bersosialisasi menunjukkan peran perempuan di mata masyarakat tidak kalah berbeda dengan laki-laki. Dengan ikut mensosialisasikan di masyarakat, perempuan bisa menunjukkan kemampuannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat untuk dirinya dan kemajuan daerahnya. Adanya sosialisasi untuk peranserta perempuan dapat dengan mudah diketahui tata cara dalam berpartisipasi tanpa harus bingung lagi dan info-info mengenai partisipasi politik kini juga dengan mudah bisa di peroleh secara mudah melalui televisi, surat kabar, internet dan berbagai sumber lainnya. Informasi melalui berbagai media massa

---

<sup>7</sup> Tangdilintin, Paulus. *Peranan Wanita Konsep Kunci Yang Masih Perlu Definisi*, dalam *Antarwidya* Nomor 3 Tahun 1 Jakarta : PAU-IS-UI, 1991), h. 12.

<sup>8</sup> Barker, Chrish. *Cultural Studies*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004), h. 33.

<sup>9</sup> Sendratari, Luh Putu. *Wanita Dalam Dimensi sejarah Implikasi Dalam Pendidikan Sejarah dalam Aneka Widya*. Singaraja : FKIP Universitas Udayana, 1992), h. 90.

adalah hal yang sangat efektif dalam mencari info-info tentang berperan dalam demokrasi khususnya politik. Dengan adanya media elektronik seperti televisi, radio, HP bisa mempermudah jalannya sosialisasi kepada masyarakat dengan di tambah peranan dari desa yang mengadakan penyuluhan dari RT ke RT tentang anjuran dan tata cara berpartisipasi berdemokrasi.

Banyaknya kegiatan yang ada di lingkungan sekitar ini membuat para gender untuk beraktivitas dan dapat di rekam jejaknya melalui hasil karyanya, baik itu perempuan maupun laki-laki sama-sama tidak mau tertinggal dengan berbagai kegiatan di lingkungannya, para perempuan dapat saling memberikan info melalui HP (media sosial dll) untuk berkomunikasi pada saat akan di adakan penyuluhan, mereka selalu ingin tahu dan mengumumkan ketika ada suatu perkumpulan seperti PKK, organisasi perempuan<sup>10</sup> Bahkan melalui Media Sosial. Peran perempuan dalam demokrasi sangat di pentingkan bukan hanya berjenis kelamin perempuan saja, melainkan perempuan secara idiologis, yakni perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan.

## **5. Perempuan Pembuat dan Penentu Keputusan Politik**

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa alternatif tempat strategis yang relevan bagi perempuan untuk berperan serta dalam politik.

Menurut Sari Murti W.<sup>11</sup> Ada tiga hal yaitu : Pertama, perempuan perlu melibatkan diri ke dalam partai politik sebagai

---

<sup>10</sup> Ignas Kleden. *Partai Politik dan Politik Partai*. Tempo, Edisi 29, 2004, h. 11.

<sup>11</sup> Sari Murti W... *Perempuan dan politik Di Era Otonomi Daerah dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. (Bantul : IP4 Laperra Indonesia, 2001), h. 33.

pintu masuk ke posisi legislatif (Badan Perwakilan Desa/BPD) dan eksekutif. Kedua, posisi sebagai tokoh masyarakat, sehingga bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dengan demikian setiap usaha pembangunan dapat dikendalikan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya agar kepentingan perempuan tidak terabaikan. Ini berarti sekaligus akan merubah paradigma perempuan sebagai obyek pembangunan berubah menjadi subyek pembangunan. Ketiga, memosisikan diri sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Sangat cocok bagi perempuan biasa-biasa saja namun punya komitmen yang tinggi untuk senantiasa melaksanakan kebaikan bersama. Dengan demikian sangat terbuka bagi perempuan memainkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian tidak serta merta peluang ini dimanfaatkan oleh perempuan karena bagi perempuan pada umumnya, politik dianggap urusan laki-laki, politik kotor, politik itu keras sehingga perempuan tidak perlu terlibat didalamnya. Pandangan seperti itu membuat tidak banyak perempuan yang terjun ke politik, walaupun secara yuridis formal hak-hak itu diakui (Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Peran perempuan dalam pemerintahan, eksekutif, legislative dan yudikatif dapat dicermati bahwa tidak lepas dari profesionalnya jika di belaki oleh pendidikan namun dalam kebanyakan perempuan dapat menjadi pelengkap obyek saja jika ada, hanya siap di dudukkan oleh partai saja karena tidak di bekali oleh keilmuannya, sehingga adanya perempuan yang di bekali oleh pendidikan yang tinggi dan rendah, dalam organisasi itu akan terlihat pada hasil kerja dan unjuk kerjanya seberapa banyak mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintah maka sebanyak itupula perempuan terlibat dalam pembuat dan penentu keputusan walaupun tidak serta merta terlihat di politisir/ dimanfaatkan keilmuannya karena statusnya sebagai perempuan yang dianggap lawan jenisnya lemah, sebab misalnya

dalam kepartaian perempuan hanya sebagai sekretaris dan anggota, kalau jadi ketua sudah pasti dari lawan jenisnya (Laki-laki).

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, terhadap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Seri Buku Demokrasi Edisi III. 2006. "Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik". Juga dalam buku; Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's Averroes dan KID kerjasama dengan Averroes Press, 148. 7 Putra Fadillah. 2003. "Partai Politik dan Kebijakan Publik" Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Averroes Press, 261. 165, menyatakan bahwa: kapasitas perempuan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak gender haruslah dapat mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat. Perempuan juga dapat menjadi bagian dari Struktur peran pada masyarakat lokal dan tempat kerja yang jika tidak berdaya maka akan dengan cepat meninggalkan kualitas demokrasi keterwakilan. Aktifnya perempuan akan menjadi Suatu penilaian masyarakat dan membuat orang-orang "lebih mampu menaksir kinerja wakil-wakil rakyat termasuk para perempuan di tingkat nasional, apakah lebih mampu mengambil keputusan untuk lingkup lokal, nasional dan International jika dimungkinkan, dan lebih mampu menimbang dampak keputusan yang diambil oleh wakil-wakil nasional pada kehidupannya. Rousseau merasa bahwa ketimpangan sosial, ekonomi juga pendidikan sangat penting, akan menghalangi individu/perempuan/warga negara untuk memperoleh hak-hak politik yang sama. Dengan kata lain ketimpangan pendidikan yang rendah, tidak akan ada/jauh dari ilmu pendidikan demokrasi politik. Bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang

diinginkan. Kecuilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili 30% pada setiap Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik. Oleh karena itu selain komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undangundang yang lebih tegas berpihak kepada masalah quota perempuan ini. Perangkat pengaturan quota masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan. Sebaliknya pengaturan quota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor demokrasi, dan kalangan masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, tetapi bukan paksaan dan dianggap sangat Urgen.

## **6. Strategi Perempuan Dalam Berdemokrasi**

Dalam berdemokrasi, beberapa strategi pokok yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi (keterwakilan) perempuan dalam politik untuk mendapatkan peluang yang ditawarkan oleh UU Pemilu. Beberapa diantaranya:

- a. Tetapkan target: baik pemerintah maupun partai politik harus menetapkan target paling sedikit sebesar 30% bagi perempuan untuk duduk di lembaga pengambilan keputusan.
- b. Memastikan bahwa sistem Pemilu yang diteapkan dapat menguntungkan perempuan. Sistem proporsional dengan sistem daftar terbuka oleh banyak pihak dianggap dapat menguntungkan perempuan karena hanya dalam sistim ini kebijakan alternatif dapat diterapkan. Mengenai hal ini juga telah diakomodirkan dalam UU Pemilu.
- c. Melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk perempuan dalam rangka meningkatkan kesadaran politik perempuan serta mengubah visi politik mereka. Dalam

pendidikan politik, pengertian politik haruslah diredefiniskan dalam perspektif perempuan. Termasuk didalamnya meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Pendidikan pemilih tidak hanya diarahkan kepada bagaimana melakukan pencoblosan dan pemantauan Pemilu sehingga tercipta Pemilu terbuka dan jujur dan memenuhi kuota 30%. Juga meningkatkan keterampilan mereka melakukan advokasi agar kepentingan yang telah dijanjikan oleh partai dapat dipenuhi ketika partai telah mendudukkan wakilnya di DPR/DPRD.

- d. Memberikan dukungan penuh bagi kandidat perempuan agar tampil secara meyakinkan dan memberikan dukungan penuh ketika mereka telah menjadi legislator dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan bagi tugas-tugas mereka.
- e. Memastikan para anggota parlemen dapat berpartisipasi dalam melakukan reformasi semua kebijakan dan peraturan perundangan yang diskriminatif dan tidak berperspektif gender sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN 1999.
- f. Bekerjasama dengan media untuk mengubah citra perempuan sebagai makhluk politik.
- g. Membentuk Kaukus perempuan sebagai sarana lobi untuk memastikan bahwa perspektif perempuan dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang akan diambil.

Terdapat hubungan yang sangat erat antara akses perempuan dalam politik khususnya di parlemen dan partisipasi mereka dalam mengambil keputusan yang berperspektif gender. Akses perempuan dalam politik adalah prasyarat bagi partisipasi mereka, namun tidak dengan sendirinya menghasilkan sebuah transformasi sosial dan relasi adil gender, karena perempuan sendirilah yang harus memperjuangkannya.

Gerakan perempuan mempunyai peran signifikan bagi tumbuhnya demokrasi yang inklusif dan partisipatoris. Demokrasi di

Indonesia, seharusnya tidak hanya merupakan sarana untuk terwujudnya kedaulatan rakyat, tetapi adalah upaya untuk menjamin kesetaraan politik dan keadilan bagi seluruh warga termasuk perempuan dalam skala kelompok marginal dan minoritas.

## **PENUTUP**

Tantangan ke depan yang akan di hadapi oleh perempuan di Indonesia yakni akan semakin kompleks. Isu Demokrasi dan politik akan semakin lebih hebat jika tidak di barengi dengan kualitas pendidikan. Globalisasi demokrasi semakin hari semakin mendesak untuk di tangani. Dari sisi lingkungan pendidikan akan terus berinovasi, sehingga profesionalisme perempuan dalam memegang tonggak demokrasi harus di bekali dengan pengetahuan sehingga dapat memajukan perpolitikan kearah yang positif.

Peran lembaga pendidikan dapat mempengaruhi proses dan hasil demokrasi kearah lebih baik jika perempuan dapat di kafer secara berimbang jumlahnya dengan kaum pria, sebab perempuan dapat memberikan peranan yang penting dan signifikan kuat dalam kapasitas intelektual bahkan dapat menjadi wadah penampungan aspirasi untuk sesama kaum perempuan, sehingga perempuan tidak merasa bahwa aspirasinya tidak didiskriminasi oleh kaum pria.

Keikutsertaan perempuan dalam dunia demokrasi jika dilihat dari latar belakang lingkungan pendidikan yang baik maka dapat dilihat dari keefektifan dan keaktifan serta eksistensinya dalam memutuskan kebijakan dan aturan yang terbaik.

Persoalan perempuan tidak sebatas dalam urusan rumah tangga. Kaum perempuan sesungguhnya mampu berperan banyak di luar keluarga maupun masyarakat lebih luas. Selain itu perlu tindakan nyata untuk meningkatkan pemahaman demokrasi/politik dalam arti luas terutama bagi kelompok perempuan lainnya atau ditingkat

bawah agar sesama perempuan dapat berbagi informasi yang baik dan menarik, misalnya strategi dalam berdemokrasi dll.

### **SARAN**

Demokrasi sebaiknya dapat memperhatikan faktor pendidikan untuk dapat mendukung intelektual para calon pemilih dan calon legislatif agar dalam beraktivitas dalam dunia politik dapat diselesaikan dengan baik, benar dan bijak.

Demokrasi yang di barengi oleh ilmu pendidikan dapat memberikan kontribusi yang terbaik terhadap perempuan, kaum perempuan dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota legislaif, masyarakat dan keluarga, agar perempuan dapat berkontribusi baik terhadap profesionalisme pekerjaan dan keluarganya.

Lingkungan pendidikan dapat memberikan wawasan yang baik terhadap kaum perempuan dalam berdemokrasi dan kancah politik baik dari memutuskan aturan/kebijakan, strategi, menyelesaikan masalah/hambatan di masyarakat dll.

### **DAFTAR PUSTAKA**

\* Dr. Ridwan Tohopi, M.Si, Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo

Alquran

Barker, Chrish. *Cultural Studies*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004.

Barnadib, Sutari Imam. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP, 1989.

Budi Shanti. *Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik*, dalam *Jurnal Perempuan* No. 19. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Hermawan, Acep Wahyu. 2011. *Peran Keluarga dalam Mendidik Anak dari Usia Dini hingga Dewasa*. Tersediadalam <http://acepwahyuhermawan79.blog.com/peran-keluarga-dalam-mendidik-anak-dari-usia-dini-hingga-dewasa/>. Diunduh pada 3 Maret 2012 <http://aii-thelittlemonster.blogspot.com/2011/01/pengantar-pendidikan-faktor-lingkungan.html>
- Ignas Kleden. *Partai Politik dan Politik Partai*. Tempo, edisi 29, 2004.
- Sari Murti W. *Perempuan dan politik Di Era Otonomi Daerah dalam Perempuan Dalam Pusaran Demokrasi*. Bantul : IP4 Laperra Indonesia, 2001.
- Sayidiman, Suryohadiprojo. 2007. *Pendidikan dalam keluarga*. Tersedia dalam <http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=617>. Diunduh pada 3 Maret 2012.
- Sendratari, Luh Putu. *Wanita Dalam Dimensi sejarah Implikasi Dalam Pendidikan Sejarah dalam Aneka Widya*. Singaraja : FKIP Universitas Udayana, 1992.
- Siti Musdah Mulia. Kantor Berita Common Ground. [www.commongroundnews.org](http://www.commongroundnews.org) / <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25513&lan=ba&sp=1>. Selasa, 26 mei 2015
- Soejipto, ani widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. H.40
- Sutisna, Nia. 2010. *Kepemimpinan Orangtua dalam Membentuk Watak Anak*. Tersedia dalam <http://amany.org/artikel/kamar-nanda/149-kepemimpinan-orangtua-dalam-membentuk-watak-anak.html>. Diunduh 3 pada Maret 2012

Tangdilintin, Paulus. *Peranan Wanita Konsep Kunci Yang Masih Perlu Definisi*, dalam *Antarwidya Nomor 3 Tahun 1* Jakarta : PAU-IS-UI, 1991.

United Nations Development Group, *Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts and Sources*. United Nations, New York, 2003..